

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGIHE**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi
Magister Sistem Informasi



Oleh :
Alfrianus Papuas
24010410400007

MAGISTER SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu Sistem Informasi Pendapatan, sehingga kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perhitungan dan penyusunan laporan serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan dengan baik, akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pengguna. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) dengan sistem evaluasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk proses evaluasi, dilakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi guna mengukur kinerja pengelolaan PAD. Dalam pemodelan sistem digunakan *Unified Modeling Language* (UML) sebagai bahasa standar pemodelan. Hasil penelitian rancang bangun ini adalah Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan yang bermanfaat guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam proses pengelolaan penerimaan PAD, menyajikan laporan PAD serta mampu melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD. Hasil perhitungan evaluasi efektivitas PAD Kabupaten Sangihe tahun 2011 sebesar 83,16 persen dengan kriteria cukup efektif, untuk hasil evaluasi efisiensi sebesar 2,92 persen, dengan kriteria sangat efisien. SIPAD dapat dijadikan alternatif dalam pengelolaan penerimaan PAD Kabupaten Sangihe.

Kata Kunci : *Sistem Informasi Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Evaluasi efektivitas dan efisiensi.*

ABSTRACT

Financial management, especially in the reception area of Revenue requires a Revenue Information System, so the performance of local governments in managing local revenue receipts, calculation and preparation of reports and evaluation of the effectiveness and efficiency of local revenue can be well presented, accurate, timely and can be utilized directly by the user. The purpose of this study was to design and build Revenue Information System (SIPAD) with the evaluation system on Sangihe District Revenue Office. Revenue consists of Local Taxes, Levies, the Company's results and outcomes of management kekeyaan area demarcated area, and Other legitimate PAD. For the evaluation process, conducted evaluation of the effectiveness and efficiency in order to measure the performance of the management of PAD. In the modeling system used *Unified Modeling Language* (UML) as a standard modeling language. The study design was Revenue Information System Internal Revenue Service that are useful in order to improve local government performance in managing the process of acceptance of the PAD, the PAD and be able to present a report evaluating the effectiveness and efficiency of the management of PAD. The calculations evaluate the effectiveness of the PAD District in 2011 for Sangihe 83.16 percent effective criteria for evaluating the results of an efficiency of 2.92 percent, with a highly efficient criteria. SIPAD may be an alternative in the management of PAD District Sangihe acceptance.

Keywords: *Information Systems Revenue, Revenue, Evaluation of the effectiveness and efficiency*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tentunya implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Daerah Kabupaten Sangihe yang merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah masih dilakukan secara manual meskipun dalam penggunaan teknologi komputer sudah mulai dilibatkan dalam proses oprasional, namun hanya sebatas menggunakan program Microsoft Excel dan Microsoft Word, seperti penetapan dan penggolongan Pendapatan Asli Daerah, mencatat dan merekap kas masuk dan kas keluar, tagihan-tagihan biaya serta belanja, laporan dibuat berdasarkan kalkulasi dari dokumen-dokumen dari penerimaan yang terjadi, setelah itu baru dicatat dalam file komputer.

Salah satu kelemahan yang cukup mendasar dalam sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah selama ini di Kabupaten Sangihe adalah belum terdapatnya suatu sistem yang mampu mengelola data dan informasi Pendapatan Asli Daerah sehingga penetapan sasaran pembinaan dan penetapan target penerimaan tidak dapat dilakukan berdasarkan potensi masing-masing sumber penerimaan Pendapatn Asli Daerah. Selain itu, karena ketiadaan data dan informasi ini menyebabkan skala prioritas pengelolaan belum dapat dilakukan sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan tidak dapat diukur. Padahal khususnya jika menyangkut pajak dan retribusi, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kelayakannya, Karena itu, realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah perlu dipantau, dikontrol dan dievaluasi.

Dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu prosedur agar dapat mempermudah dalam pencatatan, penggolongan dan pengklasifikasian transaksi penerimaan yang terjadi serta agar terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem pengelolaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisa dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman, salah satunya yakni Sistem Informasi Pendapatan yang dapat meminimalkan kesalahan, mengurangi waktu pemrosesan, meningkatkan kualitas data dan informasi dan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam waktu singkat.

Mengingat pentingnya pengolahan keuangan daerah perlu dibangun suatu Sistem Informasi Pendapatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pengolahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran Pendapatan Asli Daerah serta evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan baik, akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak pengguna secara cepat, yang didalamnya termasuk pemerintah kabupaten sebagai penentu kebijakan.

Perancangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah ini menggunakan metode *Unified Modeling Language* (UML). Dalam pemodelan sistem berorientasi objek digunakan UML sebagai bahasa standar pemodelan berdasarkan grafik atau gambar untuk menspesifikasikan, membangun, memvisualisasikan dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) pada Dinas Pendapatan Daerah dengan *Unified Modeling Language* (UML) yang mampu menyajikan informasi-informasi PAD secara akurat dan tepat waktu serta melakukan evaluasi PAD.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar tidak saling berkembangnya masalah dan keterbatasan waktu yang ada maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian perancangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe.
- b. Perancangan sistem digunakan perancangan berorientasi objek dengan *Unified Modeling Language* (UML) sebagai bahasa standar pemodelan.

1.4 Keaslian Penelitian

Sistem Informasi Pendapatan dan Piutang Usaha sebagai penyempurnaan sistem yang digunakan pada perusahaan dimana pemisahan tanggung jawab masing-masing bagian sudah ditetapkan dengan jelas dan pengolahan transaksi menggunakan teknologi komputer sesuai dengan perancangan sistem yang diusulkan sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat lebih efektif dan efisien (Hendrati dan Karma, 2009).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini sistem informasi pendapatan akan diterapkan pada instansi pemerintah yakni dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dengan menerapkan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) pada Dinas Pendapatan Daerah.
2. Terwujudnya rancangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah dengan sistem evaluasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain :

1. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah ini dapat dimanfaatkan guna mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe dalam pelaksanaan pengolahan PAD.
2. Sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan dengan hasil evaluasi yang ada mampu mengukur efektivitas dan efisiensi pengolahan PAD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Sistem Informasi Pendapatan terkomputasi yang dirancang untuk meminimalkan data yang diinput oleh karyawan sehingga meminimalkan kesalahan manusia, mengurangi waktu pemrosesan. Dengan menggunakan database dapat mengurangi redundansi karenanya meningkatkan integritas / kualitas data / informasi dan membuat laporan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam waktu singkat, memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan dengan informasi yang diperbarui(Ang dan Chaiyong, 2009).

Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan sumber daya, acara, dan agen sebagai model data untuk teknik menentukan dan merancang sistem informasi akuntansi dan untuk mengembangkan prototipe sistem berdasarkan model REA (*Resource Event Agent*). Sistem Informasi Pendapatan dibangun berdasarkan pada model data REA karena hanya menangkap aspek-aspek penting dari fenomena ekonomi. Idanya adalah untuk membangun sebuah aplikasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis secara real-time dan model data REA dipilih untuk memudahkan pemahaman database. Dengan demikian (1) model disimpan ringkas dan mudah dipahami, (2) model dapat digunakan untuk banyak aplikasi, dan (3) artefak yang berasal selalu konsisten dengan menggunakan model. Sistem yang dikembangkan ini mampu melakukan peningkatan dalam proses bisnis lebih efisien, tepat waktu dalam pengumpulan kas, penyediaan informasi rekening tepat waktu untuk pengambilan keputusan (Rosali et al, 2009).

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja bagian administrasi dalam mengelola informasi dengan memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan dalam menangani pengolahan informasi, Ketelitian dan kecepatan pencarian data, Aktivitas Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas yang lebih terdokumentasi (Nurhadi, 2010).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Informasi Pendapatan

Sistem Informasi Pendapatan adalah rangkaian prosedur formal dibagian pendapatan yang timbul dari aktifitas perusahaan, antara lain transaksi penjualan dan penerimaan kas dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan proses transaksi keuangan dan non finansial yang langsung mempengaruhi keuangan. Salah satu subsistem atau 'siklus' di bidang Akuntansi Sistem Informasi adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan siklus penting dari usaha, baik pendapatan yang menghasilkan uang tunai atau kredit. Perusahaan yang penjualan dalam kredit, data pelanggan dan piutang data account menjadi aset penting di samping persediaan (Hall, 2001).

Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan dapat menangani proses-proses yang terjadi dalam proses akuntansi secara terkomputerisasi. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pembuatan dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan. Selain itu pengguna dapat menerbitkan informasi atau laporan keuangan dengan segera ketika diperlukan sebab segala perhitungan yang perlu dilakukan telah dilakukan oleh sistem. Penyimpanan data transaksi dalam *database* akan lebih menjaga keamanan data. Pencarian data akan menjadi lebih mudah, pada sistem ini data pada waktu lampau dapat dicari dengan memasukkan tanggal terjadinya transaksi, kode, ataupun deskripsi transaksi. Jika dibandingkan dengan sistem *file*, tentunya cara ini lebih efektif untuk menangani data transaksi dalam jumlah yang sangat besar (Sudana, 2007).

Siklus pendapatan didefinisikan sebagai satu set berulang kegiatan bisnis dan informasi terkait pengolahan operasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran penjualan tersebut (Romney dan Steinbart, 2002). Hal utama eksternal pertukaran informasi dalam siklus pendapatan adalah dengan pelanggan.

Salah satu tujuan sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan adalah untuk mendukung kinerja organisasi bisnis kegiatan dengan transaksi pengolahan data secara efisien. Pada dasarnya, ada empat siklus bisnis kegiatan pendapatan, yaitu (1) *sales order*, (2) pengiriman, (3) penagihan, dan (4) kas koleksi .

Fungsi kedua sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan adalah untuk memberikan kontrol yang memadai dari bisnis. Kontrol memastikan bahwa seluruh transaksi telah resmi, sah dan dicatat secara akurat. Kontrol termasuk menjaga aset (kas, persediaan,

dan data) dari kehilangan atau pencurian dan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan efisien dan efektif (Azizi et al, 1998; Romney dan Steinbart, 2002).

Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan adalah untuk memberikan manfaat informasi untuk pengambilan keputusan. Penjualan dan kas koleksi melibatkan keputusan dan untuk proses yang diperlukan untuk transfer kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan, misalnya, untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan menentukan ketersediaan persediaan.

Aliran sistem informasi pendapatan menyediakan fondasi untuk pengolahan fungsi utama, seperti jurnal entri penagihan; menghubungkan penjualan, pesanan pengolahan, status pesanan, layanan pelanggan dan penerimaan kas; pelanggan hubungan dukungan; kontrol tertagihnya piutang tersebut, pelaporan dan peraturan lembaga manajemen (Walker dan Johnson, 2001).

Pengembangan Sistem informasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan notasi *Unified Modeling Language* (UML). Berorientasi objek menggambarkan sistem sebagai objek, yang lebih dekat dengan dunia nyata dibandingkan dengan pendekatan struktural. Diagram UML yang ditampilkan di sini termasuk *Use Case Diagram* dan *Kelas Diagram*. Obyek penelitian adalah siklus pendapatan distributor produk farmasi. Sistem yang diusulkan akan menjadi terkomputerisasi. Sistem informasi akuntansi menggunakan database yang dapat digunakan oleh semua divisi terkait di siklus pendapatan. Dengan sistem baru permintaan pelanggan bisa ditangani dengan tepat waktu sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Ang dan Chaiyong, 2009).

Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan model REA (*Resource-Event-Agent*), melihat aspek-aspek penting dari fenomena ekonomi dalam membangun sebuah aplikasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis secara real-time dan model data REA dipilih untuk memudahkan pemahaman database. Dimana sistem yang dikembangkan mampu menghasilkan peningkatan dalam efisiensi proses bisnis, pengumpulan kas dan penyediaan informasi yang tepat waktu untuk pengambilan keputusan (Rosali et al, 2009).

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi pendapatan menurut IASC (*international Accounting Standards Committee*) *framework* adalah “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam

bentuk arus masuk, atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan hutang kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana (Halim, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan (Halim, 2002).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pengelolaan PAD meliputi pengidentifikasian atau pendataan sumber-sumber pendapatan, penetapan target pendapatan, proses penerimaan yang menyangkut transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, pencatatan dan penggolongan, penyeteroran serta pengelolaan pelaporan PAD, yang terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan laporan target dan realisasi PAD.

2.2.3 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah, antara lain ialah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

b. Hasil Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat, antara lain ialah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Biaya cetak KTP
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain ialah :

1. Bagi laba perusahaan milik daerah
2. Bagi laba lembaga keuangan
3. Bagi laba lembaga non keuangan
4. Bagi laba atas penyertaan modal/investasi

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.4 Sistem Pengelolaan Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah dimana berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda, keterlambatan pelaksanaan kegiatan .

Kas adalah uang tunai dan setoran dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah.

Sedangkan pengertian kas menurut PP 24 Tahun 2005 adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dari pengertian tersebut didapat bahwa penerimaan Kas adalah semua aliran uang yang masuk ke bendahara umum daerah dimana dipergunakan untuk kegiatan pemerintah.

Transaksi yang timbul akan membuat suatu jaringan prosedur yang terdiri dari penerimaan, penyetoran kas, pencatatan dan penggolongan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri : fungsi/pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, deskripsi prosedur dan di golongkan dalam sumber masing-masing PAD.

Secara umum kegiatan prosedur penerimaan dan pencatatan kas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Wajib Pajak/Wajib Bayar (WP/WB) melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak daerah atau Tanda Bukti Penerimaan (TBP) untuk retribusi daerah. Pembayaran pajak/retribusi daerah dapat melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, jika dibentuk oleh unit kerja atau langsung ke Bendahara Penerimaan Uang.
- 2) Jika dibentuk Bendahara Penerimaan Pembantu, maka Bendahara Penerimaan Pembantu akan menerima uang dan SKPD atau TBP rangkap 5 (lima) dari Wajib Pajak/Wajib Bayar. Bendahara Penerimaan Pembantu akan memperhitungkan jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD atau TBP. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip.
- 3) Jika WP langsung menyetorkan uang ke Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan akan menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SKPD atau TBP. SKPD lembar ke-1 akan diberikan kepada WP. SKPD lembar ke-5 akan diarsip.
- 4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu akan membuat Surat Tanda Setoran (STS) (minimal rangkap 2) dan menyetorkan uang ke bank selambat-lambatnya jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan rekap setoran rangkap 4. Rekap setoran diisi secara rinci : jumlah, kode rincian objek pendapatan (digit) dan objek pendapatan (ayat) serta uraiannya, berdasarkan SKPD atau TBP.
- 5) Bank akan menerima uang dan mengesahkan STS, berdasarkan penerimaan /setoran harian. Bank akan membuat Nota Kredit yang akan diserahkan ke BUD. Bank akan mengarsip STS lembar ke-2 setoran/titipan penerimaan daerah Jumat/Sabtu (akhir hari kerja) dikreditkan pada rekening BUD pada hari senin. Setoran akhir bulan harus dikreditkan pada bulan yang bersangkutan.

2.2.5 Pelaporan Pendapatan

Laporan Pendapatan adalah alat yang memungkinkan manajemen untuk memantau perusahaan kinerja. Laporan-laporan ini memberikan informasi untuk mengukur kinerja saat ini dan untuk menganalisa kinerja terhadap tujuan. Selain itu, laporan pendapatan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan mengenai harga strategi dan untuk bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Sistem untuk melaporkan pendapatan dapat memfasilitasi definisi dan dokumentasi kebutuhan informasi manajemen

yang merupakan sebuah standar sistem pelaporan yang memenuhi persyaratan pelaporan periodik tertentu(Walker dan Johnson, 2001).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Laporan Penerimaan kas
2. Laporan Pengeluaran Kas
3. Laporan biaya habis pakai
4. Laporan PAD

2.2.6 Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan pada suatu program yang sedang berjalan atau sudah berlangsung.

Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan data yang dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menjadikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi.

a. Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2002).

Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja

pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.-327 tahun 1996 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 *Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan*

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

2.2.7 **Prediksi menggunakan Regresi Linear**

Berdasarkan informasi-informasi masa lalu dapat dibuat suatu model yang menyatakan hubungan sebab akibat yang akan dijadikan landasan untuk memprediksikan/meramalkan tentang fenomena yang akan terjadi kemudian. Regresi Linear merupakan suatu persamaan guna menyatakan hubungan fungsional antara dua variabel, yaitu variabel bebas (*Independent variable*) atau variabel prediktor dengan lambang X dan variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel kriterium dengan lambang Y, yang memungkinkan seseorang dapat meramalkan nilai-nilai variabel tak bebas berdasarkan nilai-nilai variabel bebas tertentu (Susanti, 2010).

Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memprediksi atau meramalkan Y. Ramalan atau prediksi pada dasarnya merupakan perkiraan/taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai suatu variabel) untuk waktu yang akan datang. Persamaan analisis regresi seperti ditunjukkan persamaan (3).

$$\hat{Y} = a + bX \quad (3)$$

dimana ,

\hat{Y} = variabel kriterium/variabel tidak bebas

X = variabel predictor/variabel bebas

a = bilangan konstan

b = koefisien arah regresi linear

Nilai b dan a dihitung dari data-data yang ada sebelumnya, yaitu seperti yang dijabarkan dalam persamaan (4) dan (5).

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (4)$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} \quad (5)$$

dimana,

Y_i = nilai variabel tidak bebas

X_i = nilai variabel bebas

\bar{Y} = nilai rata-rata Y

\bar{X} = nilai rata-rata X

Untuk nilai rata-rata Y dan X adalah jumlah nilai total X dan Y dibandingkan dengan jumlah periode yang dihitung. Bentuk matematisnya dapat dilihat pada persamaan (6) dan (7).

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n} \quad (6)$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad (7)$$

dimana,

n = jumlah periode yang dihitung

Besarnya kesalahan standar estimasi (Se) menunjukkan ketepatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai variabel tidak bebas yang sesungguhnya. Semakin kecil nilai Se, makin tinggi ketepatan persamaan estimasi. Sebaliknya semakin tinggi nilai Se, makin rendah ketepatan persamaan estimasi. Persamaan untuk *standard error of estimate* (Se) seperti pada persamaan (8).

$$Se^2 = \frac{\sum Y^2 - a\sum Y - b\sum XY}{n - 2} \quad (8)$$

2.2.8 *Unified Modeling Language* (UML)

Keunggulan UML adalah bahwa model yang dibuat sangat mendekati dunia nyata dengan masalahnya yang akan dipecahkan oleh sistem yang dibangun. Dimana teknologi objek menganalogikan sistem aplikasi seperti kehidupan nyata yang didominasi oleh objek. UML menyediakan beberapa notasi dan artifak standar yang biasa digunakan sebagai alat komunikasi bagi para pelaku dalam proses analisis dan desain. (Booch et al, 1999).

UML merupakan sebuah bahasa pemodelan suatu sistem berdasarkan grafik atau gambar untuk menspesifikasikan, membangun, mengvisualisasikan dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML memberikan standar penulisan sebuah sistem yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas, skema data base, dan komponen yang diperlukan dalam sistem perangkat lunak.

UML terdiri atas banyak elemen-elemen grafis yang digabungkan membentuk diagram. Tujuan representasi elemen-elemen grafis ke dalam diagram adalah untuk menyajikan beragam sudut pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut. Kumpulan dari beragam sudut pandang inilah yang kita sebut sebuah model.

Diagram-diagram yang tersedia pada UML versi 1.4 ada 9 diagram yang terbagi atas 2 kategori, yaitu :

1. Diagram Struktural : Diagram Kelas, Diagram Objek, Diagram Komponen dan Diagram Penyebaran.

2. Diagram Perilaku : Diagram *Use case*, Diagram *Sequence*, Diagram *Collaboration*, Diagram *Statechart* dan Diagram *Activity*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sangihe. Adapun penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 yang meliputi penyusunan laporan, penelitian, pengolahan data dan penyusunan laporan.

3.2 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan bahan penelitian yang berhubungan dengan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah antara lain: data – data penerimaan PAD, proses pengelolaan PAD, serta data untuk mengevaluasi pengelolaan PAD.

3.3 Alat Penelitian

Alat Penelitian berhubungan dengan Alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dan melakukan pembuatan aplikasinya, diantaranya :

- a. Software : Microsoft windows, Microsoft Office, Visual Basic 6.0
- b. Hardware : Seperangkat Komputer, dokumen baik fisik maupun non fisik.

3.4 Jalannya Penelitian

Penelitian ini mengacu pada model pengembangan sistem model *Waterfall* (Pressman, 2001), terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait dan mempengaruhi yaitu :

- a. Analisis sistem

Analisis sistem mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem dan untuk mengidentifikasi pemecahannya yaitu dengan :

- Mempelajari sistem manual yang sedang berjalan pada Dinas Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan menggunakan metode PIECES dengan melakukan klasifikasi permasalahan berdasarkan kebutuhan untuk memperbaiki performa sistem (*performance*), informasi dan Data (*Information*), Pengendalian Biaya (*economics*), kendali sistem dan keamanan (*control*), Efisiensi Infrastruktur (*efisiensi*), dan perbaikan Layanan (*service*).

- Menganalisa kebutuhan data dan informasi yang diperlukan, mendefinisikan kriteria kinerja dari sistem serta menyiapkan usulan rancangan.

b. Desain Sistem

Perancangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah dengan model berorientasi objek menggunakan bahasa pemodelan UML (*Unified Modeling Language*) yaitu dengan :

- Membuat pemetaan *use case* setiap proses sistem tersebut untuk mendefinisikan dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem, menunjukkan sejumlah aktor eksternal dan hubungannya terhadap kasus-kasus pemakaian yang didukung oleh sistem.
- Membuat *class diagram* untuk menunjukkan hubungan antar *class* dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan.
- Membuat desain basis data Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah.

c. Implementasi Sistem

Sistem yang dirancang dan dibangun kemudian diimplementasikan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah. Dengan menggunakan program Visual Basic 6.0 untuk membangun aplikasi serta Microsoft Access untuk pengolahan basis data.

d. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan setelah Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah yang dibangun diimplementasikan. Dengan menguji fungsional yang ada dalam sistem dengan melihat keluaran yang dihasilkan dengan menggunakan metode black box. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian Black Box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji di bangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak di cek apakah sudah sesuai dengan

yang di harapkan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara memberi inputan dari pengguna kepada sistem yang sudah berjalan dan mengamati output yang dihasilkan.